

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

WARTA



ISSN 2088-1975
9 772088 197569

#edisi 6. 2018

**BUDAYA, POLITIK,
DAN DEMOKRASI
PANCASILA**

WARTA WANTIMPRES

Warta WANTIMPRES adalah media publikasi dwi bulanan yang bertujuan untuk menyampaikan profil dan kegiatan Wantimpres kepada publik secara berkala.

Penanggung Jawab
M. Arfan Sahib Sali K.

Pimpinan Redaksi
M. Arfan Sahib Sali K.

Editor
Untung Widodo
Veri Nurhansyah T.

Penyusun
Andhi Ilham P.
Aris Munandar
B. Bonnik Manoe
D. Herdiyan
Dian Kartika Putri
Fikroh Amali F. A.
Syahlarriyadi

www.wantimpres.go.id

FOKUS



M. Yusuf Kartanegara
Anggota
Dewan Pertimbangan Presiden

"Perilaku Politik Berlandaskan Budaya dan Pancasila"

PERSPEKTIF



Sidarto Danusubroto
Anggota
Dewan Pertimbangan Presiden

"Mewujudkan Ekosistem Politik yang Sehat"



IGN Arsana
Sekretaris Anggota
Dewan Pertimbangan Presiden

"Budaya sebagai Pilar Penting Pengembangan Demokrasi"

DAFTAR ISI

01 FOKUS

02 PERSPEKTIF

06 GALERI KEGIATAN

Alamat Redaksi :
Jalan Veteran III No 2 Jakarta 10110
Telp.: (021) 3444801
Faks: (021) 3865092
email. veri.nurhansyah@setneg.go.id



Hak Cipta dilindungi Undang - Undang.
Dipersilahkan mengutip atau memperbanyak sebagian majalah ini dengan seizin tertulis dari penulis dan/atau penerbit.

Copyright © 2018

Foto Cover :



Upacara Seren Taun di Kuningan, Provinsi Jawa Barat

© Warta - Andhi Ilham



FOKUS

Perilaku Politik Berlandaskan Budaya dan Pancasila

Letjen TNI (Purn) M. Yusuf Kartanegara, S.H.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

"Politik-lah yang menentukan kondisi Indonesia saat ini dan juga bagaimana wujudnya di masa mendatang"

Indonesia merupakan negara-bangsa yang majemuk, baik dari sisi suku bangsa, agama, ras, dan golongan. Kemajemukan ini ditopang oleh kondisi geografis Indonesia yang terbagi ke dalam ribuan pulau dan telah hidup serta berkembang sejak lama.

Kondisi masyarakat yang sangat majemuk memang terkadang menghadirkan kerentanan yang mesti dikelola dengan baik oleh bangsa Indonesia. Namun, berkat semangat Bhinneka Tunggal Ika yang berwujud dalam kebersamaan, toleransi, sopan-santun, dan kesadaran untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan, membuat Bangsa Indonesia tetap berdiri sampai sekarang.

Menurut Bapak M. Yusuf Kartanegara, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengatakan, perilaku politik seluruh elemen bangsa pada masa kini juga semestinya dilandaskan pada akar budaya dan nilai-nilai luhur yang termaktub dalam Pancasila tersebut. Nilai-nilai ini sudah terbukti menjadi "jimat sakti" Bangsa Indonesia dalam mewujudkan dan menjaga kedaulatan politik nasional terutama pada masa-masa awal kemerdekaan.

Foto : Andytiyas

Pada era Revolusi Industri 4.0 seperti saat ini, tantangan untuk berperilaku politik yang sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal kian besar. Tantangan ini terutama bersumber dari masifnya penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, dan caci maki melalui media internet. Pada konteks ini, generasi milenial merupakan salah satu kelompok masyarakat yang paling rentan terpapar hal-hal negatif tersebut.

Untuk itu, Bapak M. Yusuf Kartanegara menilai, pendidikan politik bagi generasi milenial sangat penting mengingat mereka sebagai pemegang estafet kepemimpinan Indonesia di masa depan. "Kita harus memberikan pemahaman politik secara benar, bahwa politik itu pada dasarnya mulia, karena bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat banyak," ungkap beliau.

Generasi milenial juga perlu didorong untuk mau terjun ke dunia politik dan tidak perlu alergi apalagi ragu untuk berkecimpung di bidang politik praktis. "Politik-lah yang menentukan kondisi Indonesia saat ini dan juga bagaimana wujudnya di masa mendatang," kata Bapak M. Yusuf Kartanegara. Sebagai langkah awal, generasi milenial perlu dibekali wawasan kebangsaan dan cinta tanah air yang memadai (ADA, VNT).



Mayjen Pol. (Purn) Drs. H. Sidarto Danusubroto, S.H.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

MEWUJUDKAN EKOSISTEM POLITIK YANG SEHAT

“Kita belum mencapai tingkat demokrasi substansial, masih pada demokrasi prosedural.”

Memasnya situasi politik menjelang pemilihan umum sebenarnya lazim terjadi di negara manapun. Namun, kondisi politik di Indonesia banyak dikhawatirkan memicu perpecahan masyarakat lantaran lebih didominasi oleh perilaku politik kurang patut (*bad politics*), seperti ujaran kebencian, berita bohong, dan ujaran bernuansa SARA.

Bapak Sidarto Danusubroto, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menilai, upaya membendung *bad politics* ini memang membutuhkan waktu dan usaha yang panjang. Hal ini didasarkan salah satunya pada tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang rata-rata adalah SMP kelas II dengan pendapatan per kapita US\$ 3.500. “Kita belum mencapai tingkat demokrasi substansial, masih pada demokrasi prosedural,” ungkap beliau.

Tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang masih terbatas ini kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan *bad politics*. Akibatnya, percakapan politik nasional lebih didominasi ujaran kebencian bernuansa SARA sehingga rentan memicu permusuhan dan perpecahan di kalangan masyarakat. “*Bad politics* merupakan amunisi yang digunakan oleh pihak-pihak yang kurang memiliki modal dalam adu program dan adu visi-misi,” ungkap tokoh politik lintas zaman tersebut.

Situasi tersebut tentu tidak boleh dibiarkan terus menerus. Ekosistem politik nasional yang sehat dan mengedepankan hal-hal substansial mesti terus dibangun oleh seluruh elemen bangsa. Bapak Sidarto menilai, untuk mewujudkan ekosistem politik yang sehat dan beradab, bangsa ini perlu kembali mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai luhur yang telah dipegang teguh oleh para pendiri Bangsa Indonesia, serta belajar dari pengalaman negara-negara maju.

Sudah sejak lama, para pendiri bangsa menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal, seperti saling asah, asih, asuh, memberi penghormatan kepada orang tua, guru, adat istiadat, dan agama. Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi dasar persatuan dan kesatuan meski Bangsa Indonesia terbentuk dari keragaman budaya, agama, adat istiadat, suku, dan golongan.

Di sisi lain, Indonesia juga perlu belajar dari negara-negara lain yang telah mencapai demokrasi substansial, seperti misalnya Selandia Baru, Republik Ceko, dan Jepang. Ekosistem politik di sana lebih sehat lantaran tingginya nilai toleransi di antara warganya. Masyarakat di sana juga sudah ditanamkan perilaku berketuhanan sejak usia dini, seperti jujur, disiplin, taat hukum, dan rasa malu. “Kita lihat pejabat kita ketika ditangkap KPK justru malah menunjukkan jari *‘victory’*. Di Jepang, bila ada pejabat melakukan kesalahan mereka akan harakiri atau mengundurkan diri karena rasa malu, budaya malu mereka begitu besar,” ungkap Bapak Sidarto (AIP, AM, VNT).

BUDAYA SEBAGAI PILAR PENTING PENGEMBANGAN DEMOKRASI

“Pengembangan demokrasi Pancasila ditentukan oleh gerakan memajukan kebudayaan nasional”

Pengembangan demokrasi di Indonesia telah berlangsung dengan penuh warna dan dipengaruhi oleh sistem sosial-politik yang melandasi setiap zamannya. Sejak negara ini merdeka 73 tahun yang lalu, Indonesia setidaknya telah mengimplementasikan tiga sistem demokrasi, yakni demokrasi parlementer/liberal (1945-1959), demokrasi terpimpin (1959-1966), dan demokrasi Pancasila (1967-sekarang).

Jika dicermati secara mendalam, sistem demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila sebenarnya bertolak dari titik yang sama, yaitu menerapkan nilai-nilai ideal Pancasila. Titik pembeda dari kedua sistem tersebut adalah model dan seni kepemimpinannya, serta letak penekanan penerapan sila-sila Pancasila. Terlepas dari perbedaan tersebut, satu hal yang pasti, kedua sistem demokrasi tersebut sama-sama bertujuan untuk mewujudkan Indonesia yang aman, sejahtera, dan menjadi bangsa yang besar serta terhormat.

Sebagai catatan, implementasi sistem-sistem demokrasi di setiap negara juga didasari oleh tiga perbedaan, yaitu falsafah, sistem pemerintahan, serta budaya dan keadaan sosial-ekonomi.

Dari penjelasan tersebut, terlihat jelas bahwa budaya/kebudayaan merupakan

salah satu pilar penting yang menopang pengembangan demokrasi di Indonesia. Hal ini merupakan yang lazim mengingat kebudayaan, seperti didefinisikan oleh Prof. Koentjaraningrat, merupakan hasil dari interaksi antarmanusia, dan manusia dengan lingkungannya yang mencakup tiga unsur besar, yakni ide-ide atau gagasan, sistem sosial, serta artefak.

Di Indonesia, kebudayaan nasional bersumber dari kebudayaan-kebudayaan lokal dari setiap daerah. Kebudayaan lokal tersebut menjadi representasi nilai-nilai luhur yang kemudian menyatu, dan bermuara pada Pancasila, sebagai nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia.

Untuk itu, keberhasilan pengembangan demokrasi Pancasila di masa depan sangat ditunjang oleh adanya gerakan nasional dalam upaya untuk memajukan kebudayaan nasional. Gerakan nasional ini mesti dilakukan dengan strategi yang tepat, dukungan dana memadai, serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Upaya memajukan kebudayaan nasional ini semestinya juga dilandasi spirit bahwa kebudayaan tersebut harus dikembangkan dan diterapkan sesuai perkembangan zaman, agar dapat dikuasai oleh generasi sesuai zamannya. Tak hanya itu, pemerintah perlu merancang dan membangun strategi besar (*grand design*) pengembangan kebudayaan daerah sebagai unsur utama kemajuan kebudayaan nasional (AD, IP, VNT).



Mayjen TNI (Purn) Dr. I.G.N. Arsana, S.E., M.M., PSC.
Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden
Jenderal TNI (Purn) H. Agum Gumelar

foto : dokumen pribadi



1



2



3



4



5



6



1. Ibu Sri Adiningsih, Ketua Wantimpres, menerima audiensi perwakilan PT Chevron Pacific Indonesia, pada Kamis, 1 November 2018, di Kantor Wantimpres.
2. Bapak Subagyo Hadisiswoyo, Anggota Wantimpres, mengadakan pertemuan guna menyerap aspirasi tentang "Pengadaan dan Pemeliharaan Alutsista", pada Selasa, 6 November 2018, di Kantor Wantimpres. Hadir dalam pertemuan tersebut Mayjen TNI (Purn) Hari Mulyono, Brigjen TNI (Purn) Angger Waspodo, dan Brigjen TNI Sugeng Santoso.
3. Bapak Suharso Monoarfa, Anggota Wantimpres, mengadakan pertemuan dengan Ketua dan Para Anggota *Real Estate Indonesia (REI)* guna membahas kondisi dan permasalahan sektor properti, pada Rabu, 7 November 2018, di Apartemen Dharmawangsa, Jakarta.

4. Bapak Agum Gumelar, Anggota Wantimpres, menyelenggarakan pertemuan dengan tema "Menyikapi Perkembangan Energi dan Migas di Indonesia: Saat Ini dan Acuan di Masa Depan", pada Senin, 12 November 2018, di Kantor Wantimpres.
5. Bapak Subagyo Hadisiswoyo, Anggota Wantimpres, meninjau fasilitas Korem 042/Garuda Putih, pada Selasa, 13 November 2018. Dalam kegiatan tersebut, beliau didampingi Kasrem dan para pejabat utama Korem 042/Garuda Putih.
6. Bapak Abdul Malik Fadjar, Anggota Wantimpres, mengadakan Pertemuan Terbatas tentang "RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan", pada Kamis, 15 November 2018, di Kantor Wantimpres.



7



8



9



10



11



12

- 7. Ibu Sri Adiningsih, Ketua Wantimpres, menerima audiensi Serikat Pekerja PT PLN (Persero), pada Kamis, 15 November 2018, di Kantor Wantimpres.
- 8. Bapak Abdul Malik Fadjar, Anggota Wantimpres, memberikan Kuliah Umum *Interdisciplinary Sharing* dengan tema "Pendidikan dan Pembangunan Bangsa" di hadapan ratusan civitas akademika pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), pada Kamis, 29 November 2018.
- 9. Ibu Sri Adiningsih, Ketua Wantimpres, beserta Bapak Sidarto Danusubroto, Anggota Wantimpres, mengadakan pertemuan dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Ceko dalam rangkaian kegiatan kunjungan kerja ke negara tersebut pada tanggal 2 s.d. 3 Desember 2018.

- 10. Bapak Suharso Monoarfa, Anggota Wantimpres, menjadi salah satu pembicara dalam acara *Go Startup Indonesia (GSI) Scale Conference* yang diselenggarakan oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), pada Senin, 3 Desember 2018, di Hotel Shangri-La, Jakarta.
- 11. Bapak Yahya Cholil Staquf, Anggota Wantimpres, mengadakan pertemuan dengan para Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua, pada Sabtu, 8 Desember 2018, di Kantor FKUB Provinsi Papua.
- 12. Bapak M. Yusuf Kartanegara, Anggota Wantimpres, melaksanakan kunjungan kerja ke Pusdik Zeni TNI Angkatan Darat di Bogor, pada Kamis, 20 Desember 2018. Dalam kegiatan tersebut, beliau beserta rombongan Wantimpres diterima oleh Komandan Pusdik Zeni TNI AD beserta jajaran.

WARTA Edisi 6 2018

